



Mantra Apokalips

We have sat quietly and suffered the violence of the system for too long. We are being attacked daily. Violence does not only exist in the army, the police and the prisons. It exists in the shoddy alienating culture pushed out by TV films and magazines, it exists in the ugly sterility of urban life. It exists in the daily exploitation of our Labour, which gives big Bosses the power to control our lives and run the system for their own ends.

-The Angry Brigade



Mantra Apokalips

Jurnal radikal bertendensi
ekologi anti otoritarian

www.apokalips.noblogs.org

*Majalah ini bebas untuk disebar, digandakan
maupun dicetak ulang. **FUCK** copyright*

Tim redaksi Mantra Apokalips

Daftar Isi

Editorial | Kebangkitan Anarki Global yang Mengalahkan Era 1960-an | Yang Maha Luas dan Maha Besar | Kekerasan Seksual Dibalik Perampasan Lahan di West Papua | Merebut Kebebasan, Bukan Kekuasaan! | Mayday : Mengenang Martir Anarkis | Solidaritas untuk Para Nelayan Pulau Kodingareng

“The rejection of sabotage in the metropole, based on the argument that it would be better to take things over instead of destroying them, is based on the dictum: The people of the Third World should wait for their revolution until the masses in the metropole catch up.”

— Red Army Faction

EDITORIAL

"Masalah kita berasal dari penerimaan kita terhadap sistem yang kotor dan busuk ini."

- Dorothy Day

Jurnal ini telah memasuki edisi keduanya, sebagai jurnal yang bertendensi ekologi anti-otoritarian, kami meyakini bahwa pembebasan bumi (dan binatang) haruslah radikal dan menyentuh akarnya, tidaklah cukup jika hanya mengurangi sedotan plastik, hemat air, dan bervegan. Pembebasan ini harus menyeluruh dengan cara menghancurkan sistem yang merusak ini secara total hingga ke akarnya dan membangun sebuah dunia baru dibekas sistem busuk tadi.

Dunia baru akan tumbuh dari abu kehancuran dunia lama yang sedang membusuk ini!!

Gerakan environmentalis liberal telah menunjukkan kegagalannya, protes damai teatrikal dari berbagai grup liberal ini nyatanya hanya menjadi sebuah tontonan tak berguna. Korporasi miliaran dolar tak akan berhenti merusak

jika hanya disuguhi teater dan poster lucu.

Mereka hanya bisa dihentikan dengan tindakan langsung yang mengancam keuntungan mereka.

Berhenti mengemis, pakai topengmu, akumulasikan kemarahanmu dan segera hancurkan mereka yang pantas dihancurkan!

“ Pada dasarnya, jika anda bukan utopianis, anda tolol. ”

-Jonothon Feldman

Kebangkitan Anarki Global yang Mengalahkan Era 1960-an



Ledakan protes di India terjadi atas undang-undang kewarganegaraan yang secara eksplisit mendiskriminasi 200 juta populasi Muslimnya. Pemerintah nasionalis-Hindu, Narendra Modi, telah menanggapi protes itu melalui polisi yang menembaki para demonstran dan menyerang kampus-kampus universitas. Protes global yang membara di jalanan; dari Sudan hingga ke Chile, Lebanon serta Hong Kong, akhirnya mencapai negara yang sebagian besar dari 1,3 miliar penduduknya

berusia di bawah 25 tahun. Implikasi sosial, politik, dan ekonomi tak mungkin menjadi lebih serius.

Baru bulan lalu, mahasiswa di kampus Universitas Politeknik Hong Kong melempar bom bensin ke polisi, dan pada gilirannya, polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, dan meriam air. Perlawanan kekerasan terhadap negara otoriter ini merupakan novel bagi Hong Kong. Gerakan Payung yang pertama kali mengekspresikan sentimen massa untuk otonomi yang lebih besar dari Beijing berjalan sangat damai pada 2014. Para juru kampanye demokrasi di Hong Kong saat ini juga telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari para pelajar Tiongkok yang menduduki Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Dan terhadap siapapun, mereka telah dibandingkan secara salah.

Para pelajar tahun 1989 sangat menghormati negara mereka. Dari foto-foto, para siswa yang sedang menuntut terlihat berlutut di tangga Aula Besar Rakyat dan tidak kalah jelasnya dengan gambar ikonik seorang pemrotes yang menghadapi sebuah tank. Tidak hanya di Hong Kong, pengakuan terhadap otoritas negara

sebagai juru pengadil yang pamungkas kini menghilang secara mudah; sama halnya dengan di India dan banyak negara lainnya. Hal tersebut digantikan oleh keyakinan bahwa negara telah kehilangan legitimasinya melalui tindakan kejam dan melakukan fitnah.

Hari ini, para pengunjung rasa yang sangat muda lebih sangat berguna dibandingkan dengan demonstran mahasiswa Perancis di Paris era 1968. Yang disebutkan terakhir ini menduduki tempat-tempat kerja dan belajar, jalanan, dan alun-alun. Mereka juga memperoleh kekerasan polisi melalui barikade darurat dan menggunakan molotov cocktail.

Layaknya pengunjung rasa hari ini, siswa-siswa Perancis menyeruak ke dalam kekerasan di tengah meningkatnya pertempuran jalanan pada tataran global. Mereka mengklaim

menolak nilai dan pandangan generasi yang lebih tua. Mereka juga tidak dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai sayap kiri, sayap kanan, maupun sentris. Memang, kaum radikal Perancis saat itu membingungkan banyak orang karena mereka membenci Partai Komunis Perancis hampir sebanyak partai-partai kanan. Komunis Perancis akhirnya menolak siswa-siswa yang memprotes sebagai “anarkis”.

Peyoratif biasa seperti ini membingungkan antara anarkisme dan disorganisasi. Harus diingat, bahwa politik anarkis adalah salah satu tradisi politik dan intelektual tertua di dunia modern. Hari ini, hal ini menggambarkan perubahan baru yang radikal menjadi protes di seluruh dunia. Politik anarkis mulai muncul dari pertengahan abad ke-19 dan seterusnya; yang awalnya di masyarakat di mana otokrat yang kejam berkuasa—seperti di Perancis, Rusia, Italia, Spanyol, dan bahkan Cina—dan di mana harapan perubahan melalui kotak suara tampaknya sama sekali tidak realistis.

Kaum anarkis—yang salah satunya membunuh Presiden AS, McKinley, pada tahun 1901—mencari kebebasan dari apa yang mereka lihat sebagai cara produksi ekonomi yang semakin eksploitatif. Tetapi tidak seperti kritik sosialis terhadap kapitalisme industri, mereka mengarahkan sebagian besar energinya pada pembebasan dari apa yang mereka lihat sebagai bentuk tirani dari organisasi kolektif—yakni negara dan birokrasinya; yang dalam pandangan mereka bisa komunis maupun kapitalis. Seperti Pierre-Joseph Proudhon, pemikir pelopor anarkisme (dan kritikus Marx yang kuat), mengatakan bahwa,

“Dipimpin harus dijaga, diperiksa, dimata-matai, diarahkan, digerakkan oleh hukum, diberi nomor, didaftarkan, diindoktrinasi, diceramahi, dikendalikan, diperkirakan, dinilai, dikecam, diperintahkan oleh makhluk yang tidak memiliki hak atau kebijaksanaan atau kebajikan untuk melakukannya.”

Bagi banyak kaum anarkis; negara, birokrasi, dan pasukan keamanan adalah penghinaan terhadap martabat dan kebebasan manusia. Mereka berusaha untuk mencapai kebebasan demokratis dengan pengurangan drastis kekuatan negara berkepala hydra dan intensifikasi kekuatan individu secara simultan dari bawah melalui tindakan terkoordinasi.

Untuk kaum anarkis, demokrasi bukanlah tujuan yang jauh. Kecuali, apabila dicapai melalui partai politik yang terintegrasi secara vertikal, institusi impersonal, dan proses pemilihan yang panjang. Demokrasi adalah pengalaman eksistensial yang langsung tersedia untuk individu secara bersama-sama untuk menentang otoritas dan hierarki yang menindas.

Mereka melihat demokrasi sebagai kondisi pemberontakan permanen terhadap negara yang terlalu tersentralisasi dengan perwakilan dan penegaknya; termasuk birokrat dan polisi. Keberhasilan dalam upaya ini diukur dengan skala dan intensitas pemberontakan serta kekuatan solidaritas yang tercapai; bukan



melalui konsesi apapun (selalu tidak mungkin) dari otoritas yang dihina.

Sama halnya seperti bagaimana para pengunjung rasa saat ini memandang demokrasi sebagaimana mereka berjuang; tanpa banyak harapan kemenangan yang konvensional dengan melawan pemerintahan yang digerakkan secara ideologis nan kejam.

Biarlah tanpa ada keraguan. Konflik yang lebih terbuka dan tidak terselesaikan antara warga negara biasa dan pihak berwenang cenderung menjadi norma global daripada pengecualian. Tentu saja, ketidakpuasan militan hari ini tidak hanya lebih luas daripada akhir 1960-an. Ini juga berkonotasi dengan gangguan politik yang lebih dalam.

Negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok penekan dan kepentingan yang telah mendefinisikan masyarakat politik sejak lama tiba-tiba terasa aneh. Partai dan gerakan politik gaya lama berantakan, masyarakat lebih terpolarisasi daripada sebelumnya, dan kaum muda tidak pernah menghadapi masa depan yang lebih tidak pasti. Karena marah, individu-individu tanpa pemimpin memberontak terhadap negara-negara yang semakin otoriter dan birokrasi. Dari Santiago sampai New Delhi, politik anarkis tampaknya merupakan gagasan yang waktunya telah tiba.

***Essai ini ditulis oleh Oleh: Pankaj Mishra pada 19 Desember 2019, Penulis adalah kolumnis Bloomberg. Buku-bukunya termasuk "Zaman Kemarahan: Sejarah Masa Kini," "Dari Reruntuhan Kekaisaran: Intelektual yang Menciptakan Asia," dll. dan diterjemahkan oleh Taufik Nurhidayah untuk website Jurnal Bodat (www.bodoamat.noblogs.org)*

YANG MAHA LUAS DAN MAHA BESAR

Oleh Ishmael Yahalah



Bukan tentang tuhan, bukan! Tapi sebuah pabrik yang begitu besar dan luas. Di dalamnya terdapat begitu banyak orang yang bekerja. Dan bekerja adalah satu-satunya cita-cita dalam kehidupan pekerjaannya, melampaui hidup itu sendiri. Menyedihkan! Hari belum terang dan embun belum juga menguap. Di sebuah rumah kompleks perumahan sederhana pinggir timur Kota Tetnate, sebuah aktifitas yang tiap harinya sama persis, kembali diulangi.

Edo, 33 tahun, karyawan sebuah perusahaan swasta terkemuka di Maluku Utara, telah bersiap berangkat kerja. Ia bangun sejam sebelumnya, shalat subuh dan menonton berita pagi di televisi sambil menikmati kopi susu buatan sang istri. Toety, 30 tahun, bangun lebih pagi lagi karena mesti mempersiapkan sarapan dan kebutuhan suami.

Hari ini seragam Edo mesti disetrika, "Biar rapi dan tidak dimarahi bos", begitu katanya.

Setelah Edo berangkat, Toety juga mesti mengurus Arul, 7 tahun, yang mesti ke sekolah. Anaknya yang baru kelas dua SD itu mesti sarapan, dimandikan, dan diantar ke sekolah.

Rutinitas itu diulang tiap hari. Edo tiba di rumah hampir pukul 6 petang. Sehari kerja telah membuatnya penat dan lelah. Menonton TV menjadi pilihan hiburan paling murah meriah. Jalan-jalan ke mal dan land mark biasanya dilakukan di akhir pekan, tapi tidak setiap pekan. Selepas semua itu, Edo yang lelah seharian bekerja harus istirahat agar keesokan hari terus bisa bekerja.

Keluarga Edo dan Toety adalah gambaran umum keluarga masa kini. Kehidupan harian yang keesokan harinya dipertahankan untuk terus bekerja agar dapat bertahan hidup.

Siapakah kelas pekerja hari ini?

Terutama kalangan Kiri tradisional, pandangan umum tentang kelas pekerja adalah para buruh industrial, atau kerah biru yang bekerja

di pabrik. Kadang pula memasukkan pekerja non-industrial seperti perawat dan kerah putih.

Jika memakai perspektif tersebut berarti hanya Edo yang berkontribusi pada proses produksi. Statusnya sebagai pekerja upahan jelas berbeda dengan Toeti yang tidak memiliki majikan, apalagi anaknya yang belia.

Edo bekerja dan menghasilkan nilai-lebih, sementara Toeti sama sekali tidak menghasilkan kapital, pula tidak berada dalam hubungan produksi.

Definisi tersebut jelas gagap ketika diperhadapkan pada perkembangan kapitalisme yang semakin canggih dan tidak lagi hanya beroperasi di pabrik maupun tempat kerja. Definisi tersebut menjebak pada pembagian kelas antara yang 'tereksploitasi' dan kelompok yang 'tertindas'. Sang suami yang tereksploitasi, sementara si istri 'sekedar' tertindas. Saat sepasang suami-istri berada dalam himpitan hidup yang sama, penindas yang sama, dan kemonotonan hidup yang sama, berkat definisi yang ortodoks mereka dipisahkan berdasarkan kepentingan ekonomis.

"Pabrik Sosial dan Sosialisasi" Pekerja

Mario Tronti memberikan catatan awal bagaimana kapitalisme bertransformasi, bahwa "hal paling maju dari kapitalis adalah bahwa produksi nilai-lebih (surplus value) berlangsung dimana-mana, melampaui sirkuit 'produksi-distribusi-pertukaran-konsumsi' yang terus berkembang; ini juga berarti hubungan antara produksi kapitalis dengan masyarakat borjuis, antara pabrik dengan masyarakat, antara masyarakat dengan negara, semakin melebur. Puncak

perkembangan kapitalis adalah saat hubungan sosial menjadi hubungan produksi, dimana keseluruhan masyarakat menjadi perwujudan proses produksi.

Singkat kata, keseluruhan kehidupan sosial tidak lain berfungsi sebagai pabrik, dimana pabrik memperluas dominasi kapital atas keseluruhan masyarakat".

Jika kapitalisme lampau diidentikkan dengan pabrik karena saat itu hanya pabriklah satu-satunya tempat kapitalis mengakumulasi kapital. Di pabrik atau pun kantor, majikan berkuasa penuh terhadap kehidupan pekerja. Menerapkan aturan, mendisiplinkan, memperkerjakan dan memecat, serta mengambil keputusan tentang proses produksi bahkan ke seluruh kehidupan para pekerja. Setelah bel pulang dan melewati gerbang pabrik, kehidupan pekerja tidak lagi tersentuh dengan kekuasaan majikannya meski tidak sepenuhnya bebas karena harus menjalani kehidupan dalam hirarki dan dominasi dalam bentuk lain.

Pekerja hari ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam reproduksi kapital. Tidak lagi dibatasi oleh dinding pabrik atau kantor, karena proses penciptaan kapital-kapital baru telah melebar ke kehidupan sosial, tidak lagi sekedar di tempat kerja. Pekerja juga disosialisasikan pada level sosial. Masyarakat menjadi pekerja bukan (saja) oleh rekrutmen formal melamar, mengisi lowongan kerja, dst, tetapi melalui konversi kehidupan sosial menjadi sebuah pabrik.

Kehidupan Sebagai Kerja

Apa yang menjadi ciri khusus dalam Pabrik 8

Sosial adalah keseluruhan kehidupan individu maupun sosial bermakna sebagai kerja, yaitu kerja untuk menciptakan kapital baru. Hampir tak satu pun aspek dalam hidup yang bukan merupakan kontribusi untuk penciptaan kapital baru. Kehidupan diposisikan berada di bawah kerja. Ini membuat sebagian besar waktu kita untuk 'bekerja'. Apa yang kita kenal sebagai kegiatan pasca-kerja, justru merupakan aktifitas kerja yang pasif. Aktifitas lain selain kerja direduksi menjadi hanya sekedar rekreasi (pemulihan). Perhatikan bagaimana 'waktu kerja' dan 'waktu luang' adalah hal yang tidak berbeda, sama-sama menciptakan kapital baru melalui produksi dan konsumsi. Dalam kehidupan sosial, rekreasi, kesehatan dan kesejahteraan, hingga pendidikan tidak lain sebagai hal yang dirancang untuk menunjang keuntungan kapital. Instrumen tersebut berfungsi untuk merawat kondisi sosial agar tetap tegak dan normal, demi vitalitas dan maksimalisasi kerja para pekerjanya.

Domestikasi Kerja dan Manufakturisasi Sektor Domestik

Kapital tidak perlu memerlukan tembok dan dinding raksasa di level sosial untuk membangun pabrik fisik. Dalam rangka penciptaan tenaga kerja baru misalnya, keseluruhan rangkaian produksi cukup diintegrasikan dalam kehidupan domestik/rumah tangga. Dalam kehidupan domestik, tersedia tenaga kerja murah (bahkan gratis) dengan model pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah.

Khususnya kaum perempuan, mereka bisa mengerjakan berbagai peran misalnya melahirkan generasi baru pekerja masa depan, membesarkan, mencukupi kebutuhan hidupnya, melayani suami (baca: pekerja)

agar dapat kembali bekerja keesokan harinya. Mereka juga mesti mengatur keuangan keluarga agar tidak terjadi inflasi. Kesemua pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut tidak diupah, dan bertindak sebagai tenaga tak diupah bagi kapital.

Kehidupan domestik (keluarga inti) adalah landasan pembentuk nilai masyarakat kapitalis, disemaikannya pemberhalaan kerja sebagai satu-satunya narasi yang layak.

Komposisi Pekerja Sosial

Dalam Pabrik Sosial, pekerja tidak lagi dibedakan atas diupah atau tidaknya mereka, produktif atau tidak produktifnya. Ibu rumah tangga dan seluruh kerja-kerja domestiknya, yang dulunya tidak menjadi bagian proses produksi (oleh karenanya tidak diupah) adalah kelompok yang berkontribusi erat dalam reproduksi tenaga kerja. Kehidupan domestik bukan lagi tidak ada hubungannya dengan produksi, malahan berperan penting dalam penciptaan tenaga kerja dan kapital baru.

Ke-tidak produktif-an kelompok pengangguran misalnya, bukan berarti tidak berkontribusi dalam penciptaan kapital-kapital baru. Dalam lansekap Pabrik Sosial, pengangguran misalnya, dapat menjadi instrumen oleh kapitalis untuk menciptakan nilai dan kondisi ekonomi dalam rangka memaksimalkan keuntungan maksimum yang bisa diraih pada level sosial. Hitung-hitungan ekonomi, inflasi, daya beli, persaingan kerja dan himpitan hidup telah mengaburkan perang yang sesungguhnya.

Bahkan mahasiswa/pelajar, masyarakat adat, petani subsisten, kaum minoritas, penyandang cacat, para jompo dan pensiunan memiliki fungsi masing-masing sebagai mesin dalam penciptaan kapital-kapital baru.

Inilah 'pabrik tanpa dinding' yang maha luas dan maha besar itu. Para proletariat, sebagaimana jutaan Edo dan Toeti, terus bekerja karena hanya itu pilihan yang disodorkan. Pilihan-pilihan untuk 'kehidupan lebih baik' sepanjang tetap memproyeksikan para proletariat takluk pada nasibnya, tidaklah lebih baik dari parodi perubahan.

Dalam Pabrik Sosial, berganti pemerintah, berganti partai politik penguasa, berganti presiden sepanjang tidak menghalangi kapital terus menggelembung tidak layak disebut alternatif. Satu-satunya jalan realistis yang tersisa bagi proletariat yang ingin bebas, adalah menghancurkan pabrik ini!

**“...KARENA TUJUAN DARI SETIAP PROLETAR ADALAH UNTUK TIDAK
LAGI MENJADI PROLETAR...”**



Melihat dari Perspektif Kolonialisme, Militerisme, dan Imperialisme

Pemerintahan Indonesia di Papua adalah Illegal. Pendudukan paksa Indonesia di wilayah Nieuw Guinea Barat/West Papua, dilakukan dengan pendekatan militerisme. Pemerkosaan, perampasan tanah, intimidasi, terror, pemukulan, pembunuhan merupakan cara Indonesia untuk menghancurkan kekuatan Rakyat Papua. Pemerintah Indonesia mengirimkan militer untuk memusnahkan ras/suku secara sengaja (genosida) di Papua Barat. Militerisasi Indonesia kepada West Papua didasari oleh perspektif rasis, dampaknya adalah kematian dan trauma, berdampak pada kehidupan sekarang.

Papua Barat dijajah oleh pemerintah Indonesia. Penjajahan dibuktikan dengan dua kesepakatan Internasional yang dibuat tanpa melibatkan orang Papua sebagai Subjek. Dua kesepakatan tersebut adalah New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement Pada 30 September 1962. Pemerintah Indonesia membohongi publik tentang nasionalisme orang Papua Barat atau 'Tidak ada keterlibatan orang Papua dalam perjuangan mendirikan negara Indonesia'. PEPERA sebagai langkah demokratis yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Papua dimanipulasi oleh pemerintah Indonesia.

Sumber daya alam dan manusia Papua di eksploitasi oleh pemerintah Indonesia. Militerisasi Indonesia yang diawali dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 1961. TRIKORA dilakukan sebagai landasan awal untuk penjajahan Indonesia terhadap rakyat Papua. Tentara Indonesia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Perempuan West Papua. Pola perampasan lahan yang dilakukan oleh TNI adalah menyebarkan ketakutan, intimidasi dan stigma separatis kepada Perempuan sehingga perempuan dan anak meninggalkan tanah. Tanah tersebut merupakan tanah darisuku/marga mereka (ICP, 2015). Tanah tersebut akan digunakan untuk

kepentingan perusahaan multi nasional melakukan eksploitasi tambang, kelapa sawit, dsb.

Bagaimana Militerisme, Kolonialisme dan Imperialisme mengeksploitasi Perempuan Papua?

Militerisme Indonesia Memperkosa Perempuan Papua Barat

Perempuan adalah 'mama' adalah tanah sebuah analogis sosial – budaya. Analogi ini menggambarkan masyarakat komunal Papua/Melanesia dalam melihat Perempuan. Perspektif Perempuan adalah tanah, menggambarkan Perempuan sebagai sumber kehidupan. 'Mama' atau Perempuan akan melahirkan anak-anak untuk keberlangsungan suku atau marga dari wilayah Perempuan itu atau suami Perempuan itu. Proses mengandung hingga persalinan menguatkan kontak batin antara mama dengan anaknya, sementara itu kehidupan komunal menguatkan naluri perempuan dikomunitas untuk ikut merawat anak-anak di suku/klannya. Tidak semua perempuan Papua pada situasi komunal mengelola tanah, laut, meramu untuk menyajikan makanan sehingga suku/klannya bertahan hidup ada pula Perempuan yang melakukan pemburuan juga memiliki keahlian khusus yang tidak berkaitan dengan menyajikan makanan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memahami analogi sosial-budaya masyarakat adat Papua Barat. Rasisme adalah semangat militer Indonesia melakukan pendudukan paksa wilayah Papua. Militer Indonesia beranggapan 'rakyat Papua tidak beradab dan tidak berbudaya'. TRIKORA 19 Desember 1961 menjadi fakta Indonesia tidak berperspektif bahwa Papua adalah subjek yang hidup di atas tanah leluhurnya. Mobilisasi militer Indonesia tercatat 15 operasi militer yang dilakukan sejak 1962 –2004. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa

pemeriksaan oleh militer Indonesia di Wilayah West Papua secara brutal di daerah tambang Grasberg (Gunung Nemangkawi). Laporan ini juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan digunakan sebagai instrumen penyiksaan oleh pasukan tentara dan polisi Indonesia, ketika menginterogasi Perempuan tentang keberadaan suami mereka yang diduga berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komando Pasukan khusus (KOPASUS) di sebuah desa sekitar Grasberg juga diungkapkan oleh *Internasional Center for Transitional Justice*, 2012.

Indonesia adalah Negara keji. Pemeriksaan, intimidasi dan teror dilakukan oleh militer Indonesia secara terus-menerus. Para Peneliti (*John Braithwaite* 2010:63) berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia terhadap penduduk Papua sangat keji. Kesaksian tentang penis pria yang dipotong dan vagina perempuan yang dipotong kemudian disuapi kepada suami mereka adalah fakta kekejian tersebut.

Negara terbukti melakukan pemeriksaan (merendahkan martabat/harga diri) Perempuan Papua Barat untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. Pemeriksaan secara sosial-budaya dan seksual memberikan dampak trauma bagi seluruh masyarakat Papua

Aneksasi Papua : perjanjian- perjanjian Internasional

1 Desember 1961 adalah deklarasi kemerdekaan Rakyat Papua. Rakyat Papua bersatu menyatakan bebas dari belenggu kolonialisme Belanda maupun Indonesia. Soekarno merespon peristiwa tersebut

dengan mengumandangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 1961. Sementara mobilisasi militer pemerintah Indonesia melakukan lobi internasional untuk memperkuat klaim sepihak atau penggabungan paksa terhadap wilayah West Papua. Dua perjanjian internasional yang mengikat Papua dengan Indonesia adalah:

a. *Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962*

b. *Perjanjian Roma tanggal 30 September 1962*

Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 mengatur Hak asasi penduduk Irian Barat (Tanah Papua) dengan ketentuan bahwa pada tahun 1969 akan diadakan Hak Penentuan Nasib Sendiri (*Act of Free Choice*), apakah rakyat Irian Barat (*West Papua*) ingin tetap dengan Indonesia atau memisahkan diri dengan mendirikan negara yang merdeka. Pelaksanaan perjanjian ini dipenuhi tindakan rekayasa dan intimidasi dari pemerintah Indonesia dengan mengirimkan militer Indonesia ke Tanah Papua sehingga pelaksanaannya tidak adil dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia Papua.

Kelompok atau Individu yang dianggap tidak mendukung upaya aneksasi Indonesia ditangkap dan dipenjarakan serta langsung diadili melalui pengadilan-pengadilan di seluruh Irian Barat (Tanah Papua).

Pembentukan dewan – dewan musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dimana keanggotaannya ditentukan sendiri oleh pemerintah Indonesia jumlah peserta musyawarah seluruhnya 1.020 orang, dengan menggunakan cara voting dimana tim pemerintah telah mempersiapkan satu ‘keputusan’, kemudian dibacakan dimuka sidang dan dinyatakan kepada semua peserta dengan bulat menyatakan ‘bergabung ‘ dengan Republik Indonesia.

Tindakan atau cara tersebut sangat merugikan rakyat Irian Barat (Tanah Papua), sebab dari j

umlah penduduk 800.000 orang saat itu, hanya 1.020 yang memberikan suara, bukti bahwa Indonesia mengabaikan unsur demokrasi dan keadilan.

Perjanjian Roma 30 September 1962 dibuat setelah perjanjian New York perjanjian ini ditandatangani oleh tiga negara, yaitu Republik Indonesia, Kerajaan Belanda dan Amerika Serikat. Perjanjian ini ditentukan bahwa ‘Indonesia berkuasa atas tanah Papua selama 25 tahun (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963, setelah itu Indonesia melepaskan Tanah Papua untuk membentuk satu pemerintahan sendiri (merdeka). Pemerintah Amerika Menunjang dengan menyediakan dana sebesar USD 25 juta setiap tahun. Pemerintah Indonesia diperkenankan untuk mendatangkan transmigrasi ke Tanah Papua, membuka pertambangan, pengelolaan hasil hutan dan lain sebagainya. Kenyataannya, pemerintah Indonesia melakukan transmigrasi, sedangkan sektor pertambangan dan kehutanan diberikan untuk dikelola oleh investor-investor asing.

Kedua perjanjian ini tidak disebutkan keterlibatan orang asli Papua, sedangkan persetujuannya membicarakan tentang nasib manusia dan teritori Papua dan segala isinya, sehingga Indonesia terbukti menjajah Papua. Penjajahan ini membuka akses transmigrasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada peminggiran masyarakat Papua. Perempuan dan anak menjadi kelompok sosial yang sangat dirugikan karena akses tanah (alat produksi) hilang. Perampasan lahan berakibat padah ilangnya sosial-budaya masyarakat Papua, etnosida, serta genosida.

Kepentingan Imperialisme di Papua Barat

DEFORESTASI INDONESIA 2016-2017



Menurut Walhi pada tahun 2016-2017 terdeteksi 48, 6 ribu hektar dibabat habis, untuk tujuan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain. Pada tahun 2014 pelepasan 3 juta hektar tanah di Merauke oleh Pemerintah Indonesia untuk lahan padi. 1970-an perampasan lahan masyarakat adat Keerom oleh PT. PN II oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk perkebunan kelapa sawit. 1967 Kontrak karya PT. Freeport Mc yang dilakukan oleh Presiden Indonesia, Soeharto dengan pemilik saham. Semua kontrak merupakan perusahaan multi nasional yang modal di beberapa Negara lainnya. Kontrak dilakukan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua, dirampas dengan cara kekerasan. Perempuan diperkosa, dibunuh, dipukuli, didiskriminasi.

Haluk 2019 menuliskan negara mempertahankan kedudukannya dengan melakukan Operasi Militer; Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1980), Operasi I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer Pembebasan Mapnduma (1996), Operasi Militer Biak Berdarah (1998), Operasi dan Pelanggaran HAM di Wamena Berdarah (Oktober 2000), Pelanggaran HAM penurunan bendera

Bintang Kejora di Kabupaten Merauke, Nabire, Manukwari, Kota Sorong (2000), Peristiwa Pelanggaran HAM Abepura Berdarah (2000), Peristiwa Pelanggaran HAM Wasior Berdarah (2001), Operasi Militer Wamena (2003), Operasi Militer Kabupaten Puncak Jaya (2004), Peristiwa Pelanggaran HAM Abepura (2006), Operasi Timika Tembagapura (2017-2018), Pelanggaran HAM Lanny Jaya (2016, 2018), Operasi Nduga (2018). Operasi ini menyebabkan kerugian material dan trauma bagi rakyat Papua khususnya Perempuan.

Referensi:

- Haluk, M., 2018., Tragedi Kemanusiaan Nduga, Denpasar :Pustaka Larasan.
- ICTJ, 2012., ISBN: 978-602-97558-4-8., New York
- Braithwaite, J., 2010., Anomie and Violence., Canberra : ANU E-press
- International Coalition Of Papua Team. 2015. Hak asasi manusia di Papua 2015. laporan keempat yang meliputi kejadian sepanjang bulan april 2013 hingga desember 2015.

***Essai ini ditulis oleh Oleh: Zusan C. Griapon pada 9 september 2020, Penulis adalah aktivis perempuan West Papua dan Self Determination.*

Merebut Kebebasan, Bukan Kekuasaan!



Saat seseorang datang di tengah kerumunan pandir yang kebingungan menawarkan sebuah solusi tentang perjuangan kelas dengan maksud merebut kekuasaan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, lebih sejahtera dan berpihak kepada kaum tertindas, maka pertanyaannya kemudian bukankah orang itu mulai memposisikan diri sebagai calon penguasa? Merebut kekuasaan yang lama dan menggantikannya dengan kekuasaan yang baru!

Jika kawananku mengamini dan terlena dengan retorik tua yang berpengalaman itu, maka di situasi ini seseorang telah memposisikan diri sebagai calon budak baru dengan pimpinan yang baru untuk sesegera mungkin dipaksa tunduk dan patuh pada perintah yang baru dengan nuansa kebrutalan yang serupa dahulu.

Kita telah menyaksikan beberapa abad yang lalu di Rusia, mulai pada tahun 1917 bagaimana Bolshevik mengeksploitasi perjuangan kelas pekerja untuk menggulingkan Tsar. Lenin dan Stalin yang ketika itu berhasil mengumpulkan simpatisan untuk maju ke kursi kekuasaan, membangun pemerintahan kelas pekerja yang

di dalamnya terdapat relasi pemimpin dan yang dipimpin, memerintah dan yang diperintah, lalu menciptakan kondisi ketergantungan nasib kepada negara proletariat dengan prinsip Kediktatoran Proletariat ala Marx yang kembali lagi menciptakan kondisi buruk seperti sebelumnya. Karena pada kenyataannya Bolshevik tidaklah hadir untuk mendorong terwujudnya sosialisme sejati melainkan merebut kekuasaan untuk diri sendiri, bukannya mendorong kepemilikan kolektif atas tanah dan sumber-sumber produksi, Bolshevik malah menghendaki kepemilikan pemerintah. Dampak tragis dari semua kepicikan itu adalah Bolshevik secara sistematis menghalangi, menangkapi dan menghancurkan gerakan kontrol pekerja. Bahkan tidak segan untuk membunuh orang-orang yang vokal termasuk para anarkis yang mengkritisi tiap kebijakannya yang pada akhirnya dianggap sebagai lawan atau musuh pemerintahan Bolshevik. Maka pada saat itulah kaum anarkis mulai menggambarkan sosialisme di Rusia sebagai kapitalisme negara dan kediktatoran partai.

Kegagalan dan pengkhianatan seperti ini juga terlihat jelas dalam peristiwa reformasi 1998 Indonesia bagaimana oposisi kiri berbondong-bondong menggulingkan rezim fasis Soeharto dan merebut kursi-kursi parlemen yang berujung pada pengkhianatan rakyat. Adalah bukti bagaimana para intelektual keparat itu mahir dalam mendustakan banyak dalil, mengorbankan cita-cita dan harapan bersama untuk menduduki kursi-kursi kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri.

Suatu keniscayaan jika sentralistik tatanan dengan berhala kekuasaan akan menghadirkan tirani kediktatoran yang

melegitimasi segala bentuk pengekangan, eksploitasi dan monopoli kebebasan pada tiap-tiap individu. Karena logika kekuasaan hanya menghendaki dirinya sebagai pahlawan dalam perfilman dan yang lain hanyalah penonton. Karena logika kekuasaan hanya mengkehendaki perintah tentang kepatuhan bukan keikutsertaan. Karena logika kekuasaan hanya menghendaki pengontrolan dan bukan kebebasan.

Menyaksikan logika tontonan adalah bayang-bayang yang mengerikan, membuat orang lain menggantungkan harapan dengan penuh kepasrahan kepada para pahlawan yang datang bergantian. Melihat orang-orang yang merelakan hidupnya dalam keadaan tak bernapas, “Zaratustra menyarankan agar gairah bermain dikembalikan untuk menghancurkan masyarakat yang menindas gairah”. Gairah yang merangkum semua detonator kemuakan bagi moralitas budak.

Kebebasan individu dan kebersamaan sosial menjadi sebuah hasrat yang membara bagi tiap individu yang akan menghidupi hidupnya, karena tatanan yang terdesentralisasi dengan kanton-kanton solidaritas akan meleburkan cinta dan kebebasan yang tak terbatas. Peleburan itu termanifestasikan di berbagai daerah otonom, salah satunya di Yunani tepatnya di Athena (Exarchia) yang dikelola oleh kelompok Anarkis Rouvikonas dengan prinsip anti-otoritarian, anti-kapitalisme dan semangat solidaritas yang membangun kolektif otonomis dan kehidupan yang lepas dari hegemoni kapital. Mereka saling bekerja sama dalam prinsip mutual aid dan membentuk tatanan sosial yang lebih adil secara horizontal. “Solidaritas adalah senjata” menjadi slogan yang berhasil membangkitkan gairah pemberontakan bagi kondisi sosial yang semakin brutal. Mereka bahkan berhasil mengusir para bankir dan kapitalis lainnya yang menjadikan kehidupan di sekitar kian memburuk lewat kontrol ekonomi kapital mereka, menduduki gedung-gedung kosong untuk dijadikan sebagai camp solidaritas tempat tinggal para tunawisma dan para imigran, membuka Dapur Umum serta tidak lupa membuat sekolah rakyat untuk keberlangsungan pendidikan bagi semua. Tidak terlepas juga berbagai daerah-daerah otonom lainnya yang dikelola secara kolektif dengan demokrasi akar rumput dan swakelola oleh berbagai masyarakat seperti di Zapatista (EZLN), Rojava, Cheran dan masih banyak lagi. Deklarasi perang terhadap Negara dan kapitalisme menggema dimana-mana.

Dunia yang baik adalah dunia tanpa hierarki dimana orang-orang hidup dalam kebebasan dan kebersamaan untuk menjalin hubungan yang harmonis, karena pada dasarnya kita adalah individu-individu yang mempunyai dan memiliki potensi kreatifitas yang berbeda-beda, maka potensi-potensi itu akan lebih menguat dan lebih berwarna jika kita berkumpul dan berkerja sama untuk saling membangun dan mendukung. Kebebasan merupakan hal yang esensial bagi perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia maka persamaan dan kesetaraan adalah hal yang esensial bagi kemerdekaan sejati agar solidaritas dapat berjalan dengan tujuan dan kepentingan bersama.

Menabur benih harapan hanya akan mungkin dengan berjuang mengakhiri dunia tontonan dan logika-logika ketergantungan. Kebebasan tidak untuk diminta melainkan direbut! Karena tanggung jawab kolektif adalah aktifitas revolusioner publik di wilayah kehidupan sosial dan jika setiap orang berhasil melakukannya dan memutuskan untuk menolak nilai-nilai materialistik bagi moralitas budak maka tidak ada lagi jalan bagi kekuasaan untuk mempertahankan eksistensinya. Ada banyak alternatif untuk menciptakan dunia yang lebih baik; tanpa kekuasaan, kediktatoran dan kebrutalan yang lainnya.

Karena revolusi bukanlah tujuan, melainkan jalan bagi atmosfer liar tentang kebebasan.

Maka yang terpenting adalah “Menikmati momen yang ada! jangan pernah biarkan dirimu terlibat dalam apa pun yang tidak membuatmu bergairah!”, janganlah takut terhadap apapun lagi. Bahkan jika kita akan kehilangan apapun itu setelah mati. Karena kita telah menghidupi hidup.

"bagi kaum anarkis, kebebasan bukanlah sebuah konsep filosofi yang abstrak, melainkan sesuatu yang secara konkrit, mungkin dan vital, yang mana akan membawa umat manusia ke tahap perkembangan maksimal atas semua kekuatan, kapasitas dan kemampuan yang secara alamiah telah diberikan terhadap mereka, dan mempraktikannya dalam bentuk sosial"

— Rudolf Rocker

Buku Rekomendasi



Judul Buku : PANDUAN RINGKAS
GERILYA KOTA
Penulis : Carlos Marighella
Penerbit : Daun Malam
Tahun terbit : 2017
Jumlah hlm : 116

“Tuduhan “kekerasan” atau “terorisme” tidak lagi memiliki artian negatif sebagaimana yang pernah disandangnya. Ia telah memiliki baju yang baru; sebuah warna baru. Ia tidak memecah-mecah, tidak pula mendiskreditkan; malah sebaliknya, ia merepresentasi sebuah lingkaran perhatian.”

-Carlos Marighella

Buku Rekomendasi



Judul Buku : Buruh Berkuasa
Penulis : Michail Bakunin dll
Penerbit : Daun Malam
Tahun terbit : 2016
Jumlah hlm : 268

“Hancurkan Musium...Perjuangan kita tidak dapat digantung di dinding-dinding. Biarkan masa lalu terguling di bawah ledakan revolusi...Persetan dengan budayamu, ilmu pengetahuanmu, senimu. Tujuan apa yang mereka layani? Watak pembunuh masalmu tidak dapat disembunyikan.”

-Black Mask.



May Day : Mengenang Martir Anarkis

Aksi pemogokan menuntut 8 jam kerja dalam sehari

Pada April 1886, ratusan ribu kelas pekerja di AS yang berkeinginan kuat menghentikan dominasi kelas borjuis, bergabung dengan organisasi pekerja Knights of Labour. Perjuangan kelas masif menemukan momentum di Chicago, salah satu pusat pengorganisasian serikat-serikat pekerja AS yang cukup besar. Gerakan serikat pekerja di kota ini sangat dipengaruhi ide-ide International Workingsmen Association – Sebuah serikat buruh anarkis.

Kaum buruh anarkis telah melakukan agitasi dan propaganda tanpa henti sebelum Mei untuk merealisasikan tuntutan “Delapan Jam Sehari”.

Menjelang 1 Mei, sekitar 50.000 pekerja telah melakukan pemogokan. Sekitar 30.000 pekerja bergabung dengan mereka di kemudian hari. Para pekerja turun ke jalan bersama anak-anak serta istri untuk meneriakkan tuntutan universal ‘Delapan Jam Sehari.’ Pemogokan ini membawa aktivitas industri di Chicago lumpuh dan membuat kelas borjuis panik.

Pada tanggal 1 Mei 1886 (Kemudian dikenal sebagai May Day), saat itu sebanyak 350.000 orang buruh yang diorganisir oleh Federasi Buruh Amerika melakukan pemogokan di banyak tempat di Amerika Serikat. Dua hari kemudian, 3 Mei, pemerintah mengutus sejumlah polisi untuk meredam pemogokan pekerja di pabrik McCormick.

Polisi dengan membabi-butakan menembaki pemogok yang berhamburan,

pada saat kejadian ini terdapat empat orang tewas dan jauh lebih banyak lagi luka-luka. Ini menimbulkan amarah di kalangan kaum buruh, sebagian menganjurkan supaya mereka membalas dengan mengangkat senjata.

Kaum anarkis yang di inisiasi oleh Albert Parsons dan August Spies, juga merupakan anggota aktif Knights of Labour, menyerukan kepada kelas pekerja agar mempersenjatai diri dan berpartisipasi di dalam demonstrasi keesokan hari.

Lapangan Haymarket

Pertemuan di hari berikut, 4 Mei 1886, berlokasi di bundaran lapangan Haymarket, para buruh kembali menggelar aksi mogoknya dengan skala yang lebih besar lagi, aksi ini juga ditujukan sebagai bentuk protes tindakan represif polisi terhadap buruh. Semula aksi ini berjalan dengan damai.

Karena cuaca buruk banyak partisipan aksi membubarkan diri dan kerumunan tersisa sekitar ratusan orang. Pada saat itulah, 180 polisi datang dan menyuruh pertemuan dibubarkan. Ketika pembicara terakhir hendak turun

mimbar, menurut peringatan polisi tersebut, sebuah bom meledak di barisan polisi. Satu orang terbunuh dan melukai 70 orang diantaranya. Polisi menyikapi ledakan bom tersebut dengan menembaki kerumunan pekerja yang berkumpul, sehingga 200 orang terluka, dan banyak yang tewas.

Penangkapan

Meskipun tidak jelas siapa yang melakukan pelemparan bom, media massa dan politisi borjuis mulai melemparkan tuduhan-tuduhan bahwa ledakan tersebut merupakan ulah kaum sosialis dan anarkis. Mereka menyerukan 'sebuah balas dendam yang pantas kepada kaum radikal.' Setiap tempat pertemuan, sekretariat serikat pekerja, tempat cetak, serta rumah pribadi para aktivis diserang polisi. Setiap tokoh sosialis dan anarkis ditangkap. Bahkan individu-individu yang sama sekali tidak memahami apa itu sosialisme dan anarkisme, ditahan dan disiksa.

Julius Grinnell, Jaksa Penuntut Umum kota tersebut, menyuruh kepolisian 'melakukan penyergapan terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran hukumnya'. Delapan dari tokoh anarkis yang aktif di

Chicago, dituntut dengan tuduhan pembunuhan terencana. Mereka adalah August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Fielden, Michael Schwab, Louis Lingg dan Oscar Neebe.

Pengadilan spektakuler kedelapan anarkis tersebut adalah salah satu sejarah buram lembaga peradilan AS yang sangat dipengaruhi kelas borjuis Chicago. Pada 21 Juni 1886, tanpa ada bukti-bukti kuat yang dapat mengasosiasikan kedelapan anarkis dengan insiden tersebut (dari kedelapan orang, hanya satu yang hadir. Dan Ia berada di mimbar pembicara ketika insiden terjadi), pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada para tertuduh. Pada 11 November 1887, Albert Parsons, August Spies, Adolf Fischer, dan George Engel dihukum gantung. Louise Lingg menggantung dirinya di penjara.

Sekitar 250.000 orang berkerumun mengiringi prosesi pemakaman Albert Parsons sambil mengekspresikan kekecewaan terhadap praktik korup pengadilan AS. Kampanye-kampanye untuk membebaskan mereka yang masih berada di dalam tahanan, terus berlangsung. Pada Juni 1893, Gubernur Altgeld, yang membebaskan sisa tahanan

peristiwa Haymarket, mengeluarkan pernyataan bahwa, "mereka yang telah dibebaskan, bukanlah karena mereka telah diampuni, melainkan karena mereka sama sekali tidak bersalah." Ia meneruskan klaim bahwa mereka yang telah dihukum gantung dan yang sekarang dibebaskan adalah korban dari 'hakim-hakim serta para juri yang disuap.' Tindakan ini mengakhiri karier politiknya.

Bagi kaum revolusioner dan aktivis gerakan pekerja saat itu, tragedi Haymarket bukanlah sekadar sebuah drama perjuangan tuntunan 'Delapan Jam Sehari',

tetapi sebuah harapan untuk memerjuangkan dunia baru yang lebih baik.

Pada Kongres Internasional Kedua di Paris, 1889, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur pekerja. Penetapan untuk memperingati para martir Haymarket di mana bendera merah-hitam, menjadi simbol setiap tumpah darah kelas pekerja yang berjuang demi hak-haknya.

Meskipun begitu, komitmen Internasional Kedua kepada tradisi May Day diwarisi dengan semangat berbeda. Kaum Sosial Demokrat Jerman, elemen yang cukup

berpengaruh di Organisasi Internasional Kedua, mengirim jutaan pekerja untuk mati di medan perang demi 'Negara dan Bangsa.' Setelah dua Perang Dunia berlalu, May Day hanya menjadi tradisi usang, di mana serikat buruh dan partai Kiri memanfaatkan momentum tersebut demi kepentingan ideologis. Terutama di era Stalinis, di mana banyak dari organisasi anarkis dan gerakan pekerja radikal dibabat habis di bawah pemerintahan partai komunis. Hingga hari ini, tradisi May Day telah direduksi menjadi sekadar 'Hari Buruh', dan bukan lagi sebuah hari peringatan kelas pekerja atau proletar untuk menghapuskan kelas dan kapitalisme.



Para martir Haymarket

Para Martir Haymarket

1. August Spies, imigran berkebangsaan Jerman, tewas digantung.
2. Albert Parsons, warga A.S., tewas digantung.
3. Adolph Fischer, imigran berkebangsaan Jerman, tewas digantung.
4. George Engel, imigran berkebangsaan Jerman, tewas digantung.
5. Louis Lingg, imigran berkebangsaan Jerman, bunuh diri dengan menggunakan dinamit saat berada di dalam penjara.
6. Michael Schwab imigran berkebangsaan Jerman, diberi keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman kurungan penjara seumur hidup, kemudian iampuni pada tahun 1893.
7. Samuel Fielden imigran berkebangsaan Inggris, diberi keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman kurungan penjara seumur hidup, kemudian diampuni pada tahun 1893.
8. Oscar Neebe warga A.S. keturunan Jerman, dihukum 15 tahun penjara kemudian diampuni pada tahun 1893.



SOLIDARITAS UNTUK PARA NELAYAN PULAU KODINGARENG

Para wanita dan nelayan Pulau Kodingareng, Makassar serta para aktivis ASP dan KIARA melakukan tindakan blokade terhadap kapal Queen of Netherlands (Boskalis) di perairan Galesong-Makassar. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir laut oleh kapal Boskalis yang merusak lingkungan dan mengurangi pendapatan nelayan. Dampak dari aktivitas penambangan tersebut juga telah menimbulkan konflik sosial di kalangan nelayan tradisional.

Boskalis, pemerintah Indonesia dan para aparatusnya telah meluncurkan kampanye teror terhadap para nelayan yang menentang pertambangan. Agustus lalu, polisi Indonesia menenggelamkan 3 perahu nelayan dan mengkriminalisasi 3 nelayan karena konsisten melawan penambangan.

Para nelayan berjuang secara otonom dan menggunakan aksi langsung dalam berbagai kesempatan seperti menghadang kapal tambang dan menghentikan kegiatan penambangan secara paksa.

Hentikan operasi tambang Boskalis!

Solidaritas dengan para nelayan Pulau Kodingareng!!



Instagram: @Mantra_apokalips

Telegram : @Ringo189

Surel : Apokalips@riseup.net

www.apokalips.noblogs.org